

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers nasional dalam masyarakat modern memainkan peranan penting dalam peta perkembangan informasi bagi masyarakat. Perkembangan informasi ini diantaranya yaitu berupa pendidikan, pengetahuan, hiburan maupun kontrol sosial. Peranan dan fungsi pers dalam sebuah pemberitaan adalah untuk memenuhi tiga aspek yang diharapkan masyarakat yaitu untuk kepentingan, kebutuhan dan kenyamanan masyarakat.

Saat ini industri pers berkembang secara kuantitatif, khususnya media cetak. Pesatnya perkembangan media cetak saat ini tidak terlepas dari regulasi pemerintah yang membebaskan para pengusaha di bidang pers dari kewajiban menggunakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Perkembangan dan pertumbuhan pers pada periode reformasi disebabkan oleh kebebasan politik yang mengimbas pada kebebasan pers,

sejak saat itu terbitnya media cetak seperti surat kabar, tabloid majalah dan buletin seperti tidak terbandung lagi. Perkembangan penerbitan pers dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerbitan Pers Berdasarkan Bentuk/ Form Pasca Reformasi

No	Jenis Penerbitan	Pra Reformasi	Pasca Reformasi	Jumlah
1.	Suratkabar	90	285	375
2.	Tabloid	91	625	716
3.	Majalah	100	334	434
4.	Buletin	8	3	11
Jumlah		289	1.247	1.536

Sumber: Direktorat Pembinaan Pers (1999)

Kebebasan pers yang terjadi sejak periode reformasi menjadikan fenomena kebebasan mengemukakan pendapat mengalami euforia. Pengertian mengemukakan pendapat selalu terkait dengan forum atau media yang merupakan sarana untuk menyatakan pendapat itu. Persoalannya adalah masing-masing forum dan media penyampai pendapat memiliki karakter tersendiri (Mursito, 2000).

Media dipenuhi oleh pendapat yang beragam dalam menanggapi suatu isu yang disampaikan melalui media massa. Pendapat-pendapat itu ada yang memiliki kualitas baik, dalam arti didukung oleh fakta dan argumen, dinyatakan dalam format yang sistematis dan terstruktur, tetapi banyak pula yang hanya merupakan "asal usul".

Permasalahan kebebasan pers berawal mula dari pengungkapan kebenaran fakta oleh pers. Ada etika yang mereduksi fakta ketika ia menjadi berita. Artinya, berita-berita pers tidak akan pernah sama persis dengan fakta empiris, sehingga selalu ada perbedaan antara realitas

empiris dan realitas media. Dengan demikian media memiliki apa yang disebut Postman (1995) sebagai "konversasi media", yang berarti juga media memiliki dan membangun realitasnya sendiri, yang mungkin berbeda dan berjarak dengan realitas empiris.

Berbicara tentang pers, tentu tak lepas dari kehidupan profesi wartawan. Wartawan di Indonesia pada khususnya telah memiliki wadah organisasi kewartawanan seperti dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Organisasi ini adalah bertujuan untuk mengontrol para wartawan agar terjamin hak-haknya dan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Organisasi kewartawanan seperti PWI membuat aturan-aturan seperti halnya dalam Undang-Undang maupun kode etik.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memiliki dewan kehormatan untuk menentukan apakah wartawan melanggar kode etik atau tidak. Dewan inilah yang mengkaji dan menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. Selain dewan kehormatan, masih ada lagi satu perangkat di luar itu semua yakni dewan pers. Lembaga ini adalah pengawas dari seluruh kegiatan pers termasuk ke institusi penyelenggara penerbitannya (industri media massa). Dewan Pers juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimana dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah".

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

a. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah wartawan dalam mencari informasi pada instansi Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan Jakarta telah menerapkan kode etik jurnalistik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 2 Tahun 2006, tentang profesionalisme wartawan, khususnya point:
 - a Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - b Menghormati hak privasi;
 - c Tidak menyuap;
 - d Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
2. Sejauh mana penerapan kode etik yang diterapkan oleh wartawan dalam mencari informasi pada Badan Kebijakan Fiskal Jakarta.

b. Ruang Lingkup Penelitian

Membatasi agar pembahasan ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada Badan Kebijakan Fiskal dibawah Kementerian Keuangan Jakarta Pusat.

Dengan demikian, rumusan masalah dan ruang lingkup pada penelitian ini secara garis besar adalah “**Bagaimanakah Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Tahun 2006, khususnya di BKF**”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui apakah wartawan/jurnalis di Indonesia sudah mematuhi dan menerapkan kode etik jurnalistik dalam pencarian berita di instansi pemerintah, khususnya BKF.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Penelitian Dalam Segi Akademik :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan jurnalistik khususnya media Surat Kabar dalam penerapannya untuk tetap berpegangan pada Kode Etik Jurnalistik

b. Manfaat Dalam Segi Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada dunia praktis khususnya mengenai jurnalistik dan penerapan kode etik jurnalistik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini; tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang mendukung penelitian ini; dan uraian studi empiris yang mirip dengan penelitian ini yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagaimana gambaran umum tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian berupa jenis penelitian; serta teknis pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian yang akan mengimplikasikan hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi pemaparan dan implikasi hasil analisis data yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.